





PERATURAN KALURAHAN PONJONG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG

*ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤ꧀ꦏꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ*  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Alamat : Komplek Water Byur Ponjong, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul  
DI. Yogyakarta. Email : [kalurahanponjongjaya@yahoo.com](mailto:kalurahanponjongjaya@yahoo.com)*



LURAH PONJONG  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PONJONG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONJONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 3 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 100.3.8.1/389 tertanggal 29 Desember 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
20. Peraturan Desa Ponjong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Ponjong Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ponjong Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONJONG  
dan  
LURAH PONJONG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.412.538.391,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.502.160.448,00
Surplus/Defisit	Rp	89.622.057,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.622.057,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	89.622.057,00
SilPA Tahun Berjalan	Rp	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.



Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ponjong

Ditetapkan di Ponjong  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH PONJONG,



ARIF AL FAUZI

Diundangkan di Ponjong  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK PONJONG,



WAKHID ARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PONJONG TAHUN 2023 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.530.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.327.755.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.253.291,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.412.538.391,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	752.538.020,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	677.598.978,00	
5.3.	Belanja Modal	943.223.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.502.160.448,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(89.622.057,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.622.057,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.622.057,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>89.622.057,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ponjong, 29 December 2023



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>2.412.538.391,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b><u>48.530.000,00</u></b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>15.000.000,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			15.000.000,00
	01. Bagi hasil SHU BUMKAl Hanyukupi Tahun 2023	PAD	1 Ls	15.000.000,00
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>6.700.000,00</b>
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			6.000.000,00
	01. Sewa kios milik kalurahan	PAD	8 Unit	6.000.000,00
4.1.2.91.	Balai Desa			700.000,00
	01. Sewa balai kalurahan	PAD	2 Kali	700.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>26.830.000,00</b>
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			26.830.000,00
	01. Sewa tanah sawah Persil No. 18/DL III Kr. Ijo Kulo	PAD	1 Ls	800.000,00
	02. Sewa tanah sawah Persil No. 180/SL III Kr. Ijo Kln	PAD	1 Ls	1.400.000,00
	03. Sewa tanah sawah Persil No. 18/DI III Kr. Ijo Kln	PAD	1 Ls	1.200.000,00
	04. Sewa tanah sawah Persil No. 130/SL II Sumber Kidul	PAD	1 Ls	1.800.000,00
	05. Sewa tanah sawah Persil No. 164/SL I Padangan	PAD	1 Ls	1.700.000,00
	06. Sewa tanah sawah Persil No. 164/SL I Padangan	PAD	1 Ls	1.500.000,00
	07. Sewa tanah sawah Persil No. 164/SL I Padangan	PAD	1 Ls	1.500.000,00
	08. Sewa tanah sawah Persil No. 122/SL III Ponjong	PAD	1 Ls	1.200.000,00
	09. Sewa tanah tegal Persil No. 176/DSL III Tembesi	PAD	1 Ls	550.000,00
	10. Sewa tanah tegal Persil No. 268/DI III Kuwon	PAD	1 Ls	800.000,00
	11. Sewa tanah tegal Persil No. 190/SL III Duren	PAD	1 Ls	600.000,00
	12. Sewa tanah tegal Persil No. 189/SL III Duren	PAD	1 Ls	1.300.000,00
	13. Sewa sawah tegal Persil No. 144/SL III Kuwon	PAD	1 Ls	700.000,00
	14. Sewa tanah tegal Persil No. 268/DL II Kuwon	PAD	1 Ls	800.000,00
	15. Sewa tanah tegal Persil No. 172/DL II Tembesi	PAD	1 Ls	500.000,00
	16. Sewa tanah tegal Persil No. 59/DL I Sumber Lor	PAD	1 Ls	500.000,00
	17. Sewa tanah tegal Persil No. 272/DL II Kuwon	PAD	1 Ls	1.800.000,00
	18. Sewa tanah tegal Persil No. 122/SL III Ponjong	PAD	1 Ls	1.000.000,00
	19. Sewa tanah dari SMP Negeri 1 Ponjong	PAD	1 Ls	3.500.000,00
	20. Sewa tanah dari Korwil Biddik Kapanewon Ponjong	PAD	1 Ls	1.500.000,00
	21. Sewa tanah dari Puskesmas Pembantu Ponjong I	PAD	1 Ls	150.000,00
	22. Sewa tanah dari MTs Muhammadiyah Ponjong	PAD	1 Ls	150.000,00
	23. Sewa tanah dari SD Negeri Ponjong IV	PAD	1 Ls	50.000,00
	24. Sewa tanah dari TK ABA Padangan	PAD	1 Ls	50.000,00
	25. Sewa tanah dari TK Masyithoh Sumber Lor	PAD	1 Ls	50.000,00
	26. Sewa tanah dari TK Masyithoh Karangijo Kulon	PAD	1 Ls	50.000,00
	27. Bagian Pendapatan dari sewa tanah pelungguh pamon	PAD	1 Ls	500.000,00
	28. Sewa tanah tegal Persil No. 268/DI III Kuwon (2)	PAD	1 Ls	1.180.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b><u>2.327.755.100,00</u></b>

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.006.832.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.006.832.000,00
	01. Dana Desa Tahun 2024	DDS	1 Ls	1.006.832.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>77.168.300,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			77.168.300,00
	01. Bagi hasil pajak daerah	PBH	1 Ls	53.371.500,00
	02. Bagi hasil retribusi daerah	PBH	1 Ls	23.796.800,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>869.054.800,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			869.054.800,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	869.054.800,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>275.000.000,00</b>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			275.000.000,00
	01. BKK Padat Karya Dana Istimewa	PBP	1 Ls	175.000.000,00
	02. BKK Padat Karya Padukuhan Tembesi	PBP	1 Ls	100.000.000,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>99.700.000,00</b>
4.2.5.90.	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			99.700.000,00
	01. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	PBK	1 Ls	99.700.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>36.253.291,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>1.000.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			1.000.000,00
	01. Bunga Bank Tahun 2024	DLL	1 Ls	1.000.000,00
<b>4.3.9.</b>	<b>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</b>			<b>35.253.291,00</b>
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			35.253.291,00
	01. Bagi hasil surplus pendapatan PPM Kap Ponjong	DLL	1 Ls	35.253.291,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.412.538.391,00</b>



Ponjong, 29 December 2023

Carik

WAKHID ARYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.530.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.327.755.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.253.291,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.412.538.391,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.077.511.524,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>922.919.920,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	606.125.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	606.125.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.698.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.698.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	86.035.960,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.035.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.984.940,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	464.940,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.825.940,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.825.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>51.881.604,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.736.604,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.604,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.675.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	34.470.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.470.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.875.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.800.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	DLL
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>21.660.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.140.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.780.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	800.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	940.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>70.030.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	835.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	835.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.260.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.740.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.680.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.610.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.560.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.455.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.740.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.650.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.500.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>11.020.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	6.020.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.093.459.741,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>17.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.100.000,00	DLL
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>88.745.000,00</b>	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.370.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.370.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.220.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.030.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.030.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	52.195.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.195.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>890.638.450,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	124.425.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	122.175.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	124.555.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	124.555.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	360.547.250,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	350.917.250,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	97.654.200,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	97.024.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	40.925.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.475.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	92.532.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	91.152.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	48.750.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>51.913.291,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	35.253.291,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.253.291,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	16.660.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>10.673.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.328.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.328.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.345.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>33.890.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	33.890.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>86.506.300,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.170.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.370.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.350.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.240.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	1.370.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.845.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.440.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	6.060.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	10.345.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.345.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>29.196.300,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.390.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.800.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.606.300,00	PAD, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.606.300,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.400.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.965.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.270.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.270.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.155.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.960.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.370.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.920.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.020.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.000.000,00</b>	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	11.000.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>115.882.883,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>105.632.883,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.192.883,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.192.883,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	83.670.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.670.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	2.770.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.360.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.980.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.380.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>1.270.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.270.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.410.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.410.000,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.210.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.210.000,00	PBH
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>128.800.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>118.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.502.160.448,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(89.622.057,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	89.622.057,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>89.622.057,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ponjong, 29 December 2023



Lurah



ARIF AL FAUZI

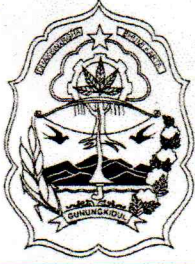
**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b><u>89.622.057,00</u></b>
6.1.1.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b><u>89.622.057,00</u></b>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			89.622.057,00
	01. Silpa ADD Tahun 2023	ADD	6.395.120,00	6.395.120,00
	02. Silpa PAD Tahun 2023	PAD	39.876.604,00	39.876.604,00
	03. Silpa PBH Tahun 2023	PBH	4.133.000,00	4.133.000,00
	04. Silpa DD Tahun 2023	DDS	32.302.200,00	32.302.200,00
	05. Silpa DLL Tahun 2023	DLL	4.292.883,00	4.292.883,00
	06. Silpa BKK Tahun 2023	PBK	2.622.250,00	2.622.250,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>89.622.057,00</b>
 Disetujui, Lurah ARIF AL FAUZI		Ponjong, 29 December 2023 Carik  WAKHID ARYANTO		



B



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KAPANEWON PONJONG**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon (0274) 3950002  
Ponsel: ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman: ponjong.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PONJONG

NOMOR : 100.3.8.1 / 389

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PONJONG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PONJONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Ponjong tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.4.4.2/4453 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponjong

Pada Tanggal 29 Desember 2023

PANEWU PONJONG,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU  
NOMOR 100.3.8.1/389.  
TENTANG EVALUASI TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN  
KALURAHAN PONJONG NOMOR  
9 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

A. RANCANGAN PERATURAN LURAH KALURAHAN PONJONG

Silahkan dilengkapi nomor surat dalam Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ponjong Tahun Anggaran 2024.

B. LAMPIRAN

Lengkap

PANEWU PONJONG





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
LURAH PONJONG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG

Nomor : .9... Tahun 2023

Nomor : .9... /Bamuskal/2023

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN PONJONG NOMOR .... TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Duapuluh Sembilan* Bulan *Desember* tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ARIF AL FAUZI

Jabatan : Lurah Ponjong

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Ponjong dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : PARJADI

Jabatan : Ketua BPKal Kalurahan Ponjong

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Ponjong selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor : .9. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor .9. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponjong, *29 Desember* 2023

PIHAK KEDUA  
PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN PONJONG  
SEKRETARIAT



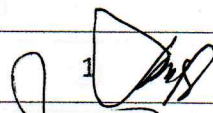
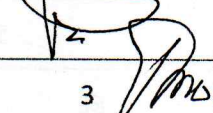

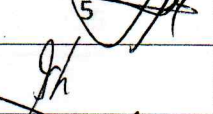
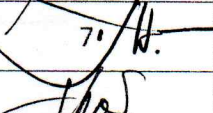
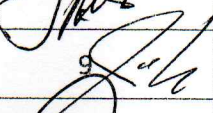
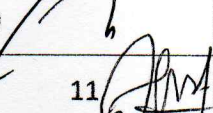
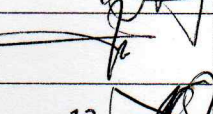
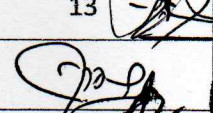
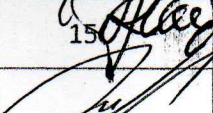
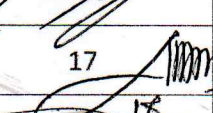
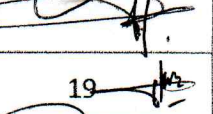
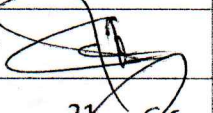
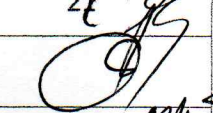
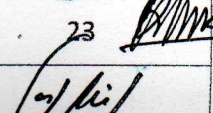

KABUPATEN GUNUNGJULU  
PIHAK PERTAMA





# DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Desember 2023  
 Tempat : Balai Kelurahan Ponjong  
 Acara : Sidang Bersama Bamuska membahas  
tentang APBKal 2024.

NO	NAMA	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD SARYATA	Karangijo Kulon	1 
2.	Puji artuh	Karangijo wetar / Pangripto	2 
3.	MUBERJIJO	KRIJO	3 
4.	SITI NADIA R	K. DO WETAN	4 
5.	Rahiman	Ponjong	5 
6.	Astutik purwandari	Tembesi	6 
7.	Iksan dwi nanda	Sumber kidul	7 
8.	SUTINO	SUMBER LOR	8 
9.	SUKATNO	KUWON	9 
10.	BUDIMAN U	tembesi	10 
11.	Damaning DA	Sumberkidul / Bamuska	11 
12.	OKTARINA FIK	SB- BIDL	12 
13.	Sanniyati	Karangijo wetar	13 
14.	legiyo	Bamuska	14 
15.	PARJATI	KRIJO Kulon	15 
16.	MALUYO	Duren	16 
17.	Sigit Supriyanto	padangan	17
18.	ARIS	Ponjong	18
19.	DOONYE A.	SUMBER KIDUL	19
20.	Supriyanto	Babinsa	20
21.	Supriyanto	Pohabin/kemtibmas	21
22.	Abdan Sulistiyono	Ponjong	22
23.	Wahid Aryanto	Padangan / carle.	23
24.	ARIF AL FAUZI	lurah	24

NO	NAMA	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
25.	AH MA		25
26.	Puji astuti	Karangjo wetan / Pangripta	26
27.			27
28.			28
29.			29
30.			30
31.			31
32.			32
33.			33
34.			34
35.			35

Ponjong, N. 29 Desember 2023

Lurah Ponjong,



ARIE AL FAUZI



## NOTULEN

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023  
Tempat : Balai Kelurahan Ponjong  
Acara : pengesahan APBDKAL 2024

### SUSUNAN ACARA :

1. Pembukaan
2. Sambutan dan penyampaian materi
3. Tanggapan
4. ....
5. ....
6. ....

#### 1. pembukaan

Acara dibuka dengan membaca bacaan basmallah.

#### 2. sambutan dan pengarahan kepala desa

- ucapan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu yang hadir pada siang hari ini kita akan membahas pengesahan APBDKAL 2024

- Ada beberapa kegiatan yang segera harus dilaksanakan akibat dari Angin kemarin ada beberapa rumah warga yang harus kita masukikan dianggarkan.

- untuk fisik ada beberapa yang belum bisa kita masukikan seperti Aspal ditembati mengingat dana yang tidak cukup untuk kegiatan aspal.

#### - penyampaian materi

pemerintah kelurahan ponjong agar menganggarkan untuk BPJS tenaga kerja Bamuska1 dan RT/RW dan untuk insentif Bamuska1 dan RT/RW ada keadilan

- perangkat desa menganggarkan seragam Lunik lengkap dan Bamuska1

- untuk kegiatan pembangunan



untuk insentif pendidik pada ada kenaikan dan juga insentif kader juga naik untuk pelayanan kesehatan.

penganggaran fensi meter dan kampung KB.

- pembangunan di Duren, Drainase di jalan, Drainase jalan lingkungan Tembesi, Rehab aspal pandangan, pembangunan cor rabat, serut, sb. kidul, karangijo kulon, cor bal jalan Lingkungan Tembesi, Rehab pembangunan jembatan, Rehab drainase karangijo wetan, Rehab / pembangunan Balai padukan padangan.

- RILH : Bp Bani, wardiyo, fendi.

- jamban sehat, sutimin, Dwi antoro, Agus, mujiyanto

### 3. Tanggapan

- untuk semua anggaran ditahun 2024 sudah diplotkan di masing masing kegiatan.

kehususnya untuk RILH mohon diinfokan awal ke yang bersangkutan agar persiapan untuk pembangunan gedung dan pagar kalurahan mohon disiapkan agar Balai kalurahan bisa tertata dan di padung nyaman.

- untuk kader yang hubungannya dengan BPPOM itu mohon juga bisa dianggarkan honorinya.

- untuk PAD yang dari BUNAKAL dengan harapan bisa ada kenaikan.

untuk pengembangan pariwisata bisa di konsultasikan dengan Dinas terkait agar nanti bisa membentuk gambaran - gambaran yang bisa untuk menemukan titik awal perkembangan pariwisata panjang.

untuk pembangunan aspal yang keadaanya sangat parah bisa diuruskan lagi.



- untuk peningkatan kapasitas BANUSKAL untuk dialihkan  
ini jika dialihkan akan diperuntukan kegiatan yang lain.
- untuk pengadaan kultivator ke kelompok tani itu nanti  
di dahului dengan pembuatan proposal masing-masing kelompok  
tani.
  - Ada anggaran THR

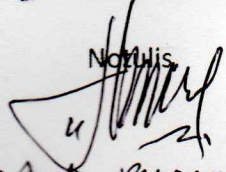
#### 4. Kesimpulan .

Rancangan APBDKAL 2024 dapat diterima dengan  
berbagai usulan . dan sehingga dapat ditanda  
tangani

#### 5- penutup .

Acara ditutup dengan membaca baccan hamdallah !

Ponjong, 29 September 2023

Notulis  
  
Astuti Purwandari.